



Hedge Accounting dan Perkembangannya dalam Manajemen Risiko: Kajian Literatur

Nadia Maulida*, Joice Carmelita Gultom, Muhammad Reynal, Jufri Darma

Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate

Korespondensi: nadiamaulidaa4@gmail.com

Abstract. Amid global economic uncertainty, companies face risks from exchange rate volatility, interest rate fluctuations, and unstable commodity prices that threaten financial stability. Hedging emerges as a strategy to mitigate such risks, while hedge accounting ensures that the recognition of derivatives is consistent with actual risk management practices. This article conducts a systematic literature review of studies published between 2021 and 2025, tracing the evolution of hedge accounting from IAS 39 to IFRS 9 and its adoption in Indonesia through PSAK 71. The shift reflects a move from a rigid rules-based framework to a more principles-based approach aligned with real-world corporate risk management. The review indicates that hedge accounting reduces earnings volatility, enhances transparency, and strengthens the credibility of financial reporting. Practical evidence can be seen in Indonesia's banking and finance sectors, where the implementation of PSAK 71 and the expected credit loss model increased loan loss provisions while signaling prudence to investors. Thus, hedge accounting functions not only as an accounting mechanism but also as a core element of modern risk management strategies.

Keywords: Hedge Accounting, Hedging, Risk Management, IFRS 9, PSAK 71

Abstrak. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perusahaan menghadapi risiko akibat fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, serta ketidakstabilan harga komoditas yang mengancam stabilitas keuangan. Strategi lindung nilai (hedging) digunakan untuk meredam dampak tersebut, sementara akuntansi lindung nilai (hedge accounting) memastikan pencatatan derivatif selaras dengan praktik manajemen risiko yang diterapkan. Artikel ini menyajikan kajian literatur sistematis terhadap publikasi tahun 2021–2025 yang menelusuri perkembangan hedge accounting dari IAS 39 menuju IFRS 9 dan adopsinya di Indonesia melalui PSAK 71. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan berbasis aturan yang kaku menuju kerangka berbasis prinsip yang lebih sesuai dengan praktik manajemen risiko perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hedge accounting mampu menekan volatilitas laba, meningkatkan transparansi pelaporan, serta memperkuat kredibilitas tata kelola keuangan. Implementasi nyata terlihat pada sektor perbankan dan pembiayaan di Indonesia, di mana penerapan PSAK 71 beserta model kerugian kredit ekspektasian mendorong peningkatan cadangan kerugian sekaligus memberi sinyal kehati-hatian kepada investor. Dengan demikian, hedge accounting tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme akuntansi, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi manajemen risiko korporasi modern.

Kata kunci: Hedge Accounting, Lindung Nilai, Manajemen Risiko, IFRS 9, PSAK 71.

LATAR BELAKANG

Ketidakpastian perekonomian global yang ditandai dengan gejolak nilai tukar mata uang, perubahan harga komoditas, serta fluktuasi suku bunga menjadi tantangan besar bagi stabilitas keuangan perusahaan (Ogundu, 2025). Kondisi ini berimplikasi pada arus kas, laba, dan valuasi aset sehingga mengurangi kepastian pendapatan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang

Received September 19, 2025; Revised September 25, 2025; Accepted October 01, 2025

*Corresponding author, e-mail address

(Bartram, 2008 dalam Ogundu, 2025). Untuk meredam dampak tersebut, banyak perusahaan mengandalkan strategi lindung nilai (*hedging*).

Lindung nilai merupakan strategi perusahaan dalam meminimalisasi risiko keuangan dengan menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak serah, kontrak berjangka, opsi, dan swap. Karakteristik utama dari strategi ini adalah keterkaitan langsung antara instrumen derivatif dengan eksposur risiko tertentu, misalnya risiko nilai tukar dan risiko suku bunga (Hasanah, 2022 dalam Dialysa, 2024). Sebelum adanya *hedge accounting*, keuntungan atau kerugian dari instrumen derivatif diakui langsung dalam laporan laba rugi. Hal tersebut menciptakan volatilitas laba yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual perusahaan (Putro & Chabachib, 2012 dalam Dialysa, 2024). Akibatnya, informasi keuangan berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan karena tidak sepenuhnya menggambarkan strategi mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Hedge accounting kemudian diperkenalkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Mekanisme ini menyelaraskan pengakuan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dengan perubahan nilai aset atau liabilitas yang dilindungi (Tantry & Lindrawati, 2023). Dengan begitu, laba perusahaan menjadi lebih stabil dan representatif, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sekaligus menumbuhkan kepercayaan investor maupun kreditur (Razak et al., 2023). Perusahaan yang konsisten menerapkan strategi lindung nilai terbukti memiliki arus kas yang lebih terkendali serta daya tahan yang lebih kuat terhadap gejolak pasar (Sukistini & Kristanti, 2024).

Seiring meningkatnya kompleksitas pasar keuangan, standar akuntansi juga berkembang. Pada mulanya, *International Accounting Standard (IAS)* 39 menjadi pedoman utama akuntansi lindung nilai. Namun, standar tersebut dinilai terlalu rumit dan kaku serta tidak sepenuhnya mencerminkan praktik manajemen risiko (Jiwandhana & Triaryati, 2016 dalam Sukistini & Kristanti, 2024). Untuk mengatasi kelemahan tersebut, *International Accounting Standards Board (IASB)* menerbitkan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* 9 pada tahun 2014 yang kemudian diadopsi ke dalam PSAK 71 di Indonesia. Standar baru ini menggunakan pendekatan berbasis prinsip yang lebih fleksibel dengan penekanan pada hubungan ekonomi antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi, bukan sekadar uji efektivitas kuantitatif (Tantry & Lindrawati, 2023).

Meskipun PSAK 71 memberi kerangka yang lebih sejalan dengan praktik manajemen risiko modern, implementasinya di Indonesia tidak terlepas dari kendala. Keterbatasan pemahaman praktis, kesiapan sumber daya manusia, serta faktor institusional di negara berkembang menjadi hambatan yang cukup signifikan (Sukistini & Kristanti, 2024). Hal ini menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai peran *hedge accounting* dalam pengelolaan risiko, terutama di Indonesia yang tengah menyesuaikan diri dengan dinamika standar pelaporan internasional.

Di sisi lain, praktik lindung nilai telah lama berkembang di sektor komoditas dan industri dengan eksposur harga yang tinggi, seperti minyak, gas, dan pertanian. Perusahaan multinasional memanfaatkan instrumen derivatif untuk menjaga kestabilan pendapatan sekaligus melindungi nilai transaksi lintas negara. Dari sinilah muncul kebutuhan agar pelaporan akuntansi tidak hanya mencatat derivatif secara terpisah, tetapi juga merepresentasikan realitas ekonomi perusahaan (Ogundu, 2025). *Hedge accounting* kemudian dirancang untuk menghubungkan strategi lindung nilai dengan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan lebih relevan dan dapat dipercaya.

Dalam konteks Indonesia, urgensi *hedge accounting* semakin terlihat jelas karena tingginya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS. Perusahaan di sektor ekspor-impor, penerbangan, maupun perbankan sangat rentan terhadap gejolak kurs dan suku bunga. Tanpa lindung nilai, fluktuasi laba lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar ketimbang kinerja operasional. Hal ini tidak hanya menurunkan keandalan laporan keuangan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan usaha (Razak et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan PSAK 71 yang mengatur *hedge accounting* menjadi instrumen penting dalam memperkuat manajemen risiko sekaligus menjaga kredibilitas pasar keuangan domestik.

KAJIAN LITERATUR

A. Konsep Dasar *Hedge Accounting*

Hedge accounting pada dasarnya merupakan metode akuntansi yang dirancang untuk mengurangi *accounting mismatch* atau ketidaksesuaian antara pencatatan instrumen derivatif dengan item yang dilindungi (Allini et al., 2025). Tanpa mekanisme ini, perubahan nilai wajar derivatif sering diakui pada periode yang berbeda dengan dampak aset atau liabilitas terkait, sehingga menimbulkan volatilitas laba yang tidak

menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya (Kreß et al., 2025). Tujuan utama *hedge accounting* adalah menyelaraskan pengakuan keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai dengan periode pengakuan item yang dilindungi. Dengan cara ini, laporan keuangan lebih mampu merepresentasikan strategi manajemen risiko yang diterapkan perusahaan (Allini et al., 2025). Oleh karena itu, *hedge accounting* tidak hanya dipandang sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan transparansi informasi bagi investor dan kreditur (Kreß et al., 2025).

B. Perkembangan Standar *Hedge Accounting*

1) Fase IAS 39

IAS 39 merupakan standar internasional pertama yang secara formal mengatur *hedge accounting*. Standar ini memperkenalkan tiga jenis utama lindung nilai, yaitu *fair value hedge*, *cash flow hedge*, dan *net investment hedge* (Allini et al., 2025). Namun, IAS 39 menuai kritik karena sifatnya yang terlalu kompleks dan kaku. Persyaratan efektivitas lindung nilai yang sangat ketat membuat banyak strategi hedging yang sebenarnya efektif secara ekonomi tidak dapat memenuhi syarat akuntansi (Ali et al., 2025). Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi perusahaan: apakah memilih strategi mitigasi risiko yang optimal tetapi tidak diakui secara akuntansi, atau strategi yang sesuai dengan regulasi namun kurang efektif secara praktis (Ali et al., 2025).

2) Fase IFRS 9

Sebagai penyempurnaan, IASB mengeluarkan IFRS 9 pada 2014 yang berlaku efektif secara global sejak 2018 (Jiannan et al., 2024). IFRS 9 mengadopsi pendekatan berbasis prinsip yang lebih fleksibel. Beberapa perubahan utama mencakup:

- Penyederhanaan pengujian efektivitas lindung nilai, dengan beralih dari pendekatan kuantitatif kaku menjadi evaluasi hubungan ekonomi antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi (Allini et al., 2025).
- Penghapusan kewajiban mengukur ketidakefektifan lindung nilai secara terpisah, yang sebelumnya menimbulkan volatilitas laba yang tidak relevan (Ali et al., 2025).
- Perluasan jenis instrumen yang dapat digunakan, termasuk instrumen non-derivatif tertentu, sehingga perusahaan memiliki pilihan lebih beragam dalam praktik lindung nilai (Allini et al., 2025).

Dengan IFRS 9, *hedge accounting* menjadi lebih konsisten dengan praktik manajemen risiko aktual. Standar ini memungkinkan perusahaan menetapkan strategi

lindung nilai yang benar-benar digunakan dalam kegiatan ekonomi, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Ali et al., 2025).

3) Fase PSAK 71 di Indonesia

Di Indonesia, IFRS 9 diadopsi ke dalam PSAK 71 yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Salah satu perubahan signifikan dalam standar ini adalah peralihan dari metode *incurred loss* ke model *expected credit loss* (ECL), yang bersifat prospektif (Arifullah & Firmansyah, 2021). Model ECL mendorong perusahaan untuk memperhitungkan potensi kerugian sejak awal pengakuan instrumen keuangan, sehingga pelaporan risiko kredit menjadi lebih realistis dan relevan. Implementasi PSAK 71 menimbulkan dampak nyata, khususnya bagi sektor keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan peningkatan signifikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setelah standar ini diterapkan, yang pada gilirannya menekan profitabilitas (Kustina & Putra, 2021; Maurida, 2022). Namun, investor menilai langkah tersebut positif karena mencerminkan kehati-hatian perusahaan dalam menghadapi risiko, terutama pada masa pandemi (Harindra et al., 2023).

C. Dampak *Hedge Accounting* dalam Manajemen Risiko

Hedge accounting membawa dampak nyata pada pengambilan keputusan keuangan. Eierle et al. (2025) menemukan bahwa derivatif yang ditetapkan secara resmi sebagai instrumen lindung nilai berkorelasi positif dengan investasi modal di masa depan. Temuan ini mengindikasikan bahwa *hedge accounting* memberikan sinyal kredibilitas kepada investor dan kreditur mengenai komitmen perusahaan dalam mengelola risiko.

Selain itu, Ali et al. (2025) menunjukkan bahwa aturan *hedge accounting* yang lebih sederhana, seperti ASU 2017-12 (setara IFRS 9), mendorong peningkatan penggunaan derivatif. Hal ini membantu perusahaan mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga, sekaligus menstabilkan arus kas. Stabilitas arus kas pada akhirnya memperbesar kapasitas perusahaan dalam melakukan investasi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan PSAK 71 menghasilkan gambaran serupa. Beberapa studi mencatat adanya peningkatan cadangan kerugian pasca-adopsi standar ini yang berdampak pada penurunan laba bersih. Meski demikian, investor menafsirkan langkah tersebut sebagai tanda kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang lebih serius (Firmansyah et al., 2023).

D. Sintesis Perkembangan dan Implikasi

Evolusi dapat dibagi dalam tiga tahap utama: IAS 39, IFRS 9, dan PSAK 71. Pada tahap IAS 39, standar yang berlaku dinilai terlalu kaku sehingga memunculkan kesenjangan antara strategi lindung nilai yang efektif secara ekonomi dengan perlakuan akuntansi yang sah (Ali et al., 2025).

Tahap IFRS 9 membawa pembaruan fundamental melalui kerangka berbasis prinsip. Mekanisme pengujian efektivitas menjadi lebih sederhana, sementara pencatatan derivatif semakin selaras dengan praktik manajemen risiko yang dijalankan perusahaan. Hal ini menjadikan *hedge accounting* lebih relevan dan kredibel di mata pemangku kepentingan (Allini et al., 2025; Jiannan et al., 2024).

Adopsi PSAK 71 di Indonesia menandai babak baru modernisasi standar akuntansi. Pergeseran ke model ECL menunjukkan perubahan pendekatan dari reaktif menjadi proaktif dalam pelaporan risiko kredit (Rahayu, 2021). Walaupun berdampak pada kenaikan cadangan kerugian dan penurunan laba jangka pendek, langkah ini justru meningkatkan kepercayaan investor karena laporan keuangan lebih mampu mencerminkan risiko masa depan (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Dari keseluruhan literatur, terlihat bahwa *hedge accounting* kini diposisikan sebagai instrumen strategis dalam manajemen risiko, bukan lagi sekadar prosedur akuntansi. Standar baru mendorong transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat keandalan laporan keuangan. Meski begitu, tantangan di negara berkembang seperti Indonesia tetap ada, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, pemahaman regulasi, dan kualitas pengungkapan (Sukistini & Kristanti, 2024). Kondisi ini membuka peluang riset lanjutan untuk menilai efektivitas *hedge accounting* dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menelaah perkembangan *hedge accounting* dalam konteks manajemen risiko. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif, terstruktur, dan objektif (Jiannan et al., 2024). Data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang tersedia di basis data bereputasi seperti Google Scholar dan Scopus. Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2021–2025, ditulis dalam bahasa

Indonesia atau Inggris, diterbitkan di jurnal terindeks, serta membahas *hedge accounting*, IFRS 9, PSAK 71, dan kaitannya dengan manajemen risiko. Sebaliknya, publikasi yang berada di luar periode tersebut, tidak relevan, atau bukan hasil penelitian akademik dikecualikan. Tahapan pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan identifikasi literatur melalui kata kunci, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, hingga pembacaan penuh artikel yang lolos seleksi. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan teknik sintesis naratif dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama: (a) konsep dan peran *hedge accounting*, (b) perubahan standar dari IAS 39 ke IFRS 9, dan (c) relevansi serta tantangan penerapan PSAK 71 di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemetaan literatur yang jelas sekaligus mengidentifikasi celah riset yang masih terbuka dalam konteks manajemen risiko perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi *Hedge Accounting* dalam Manajemen Risiko

Perjalanan *hedge accounting* mencerminkan pergeseran paradigma dalam praktik akuntansi modern. Pada masa awal, pencatatan derivatif dilakukan terpisah dari aset atau liabilitas yang dilindungi sehingga menimbulkan volatilitas laba yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi sebenarnya (Kreß et al., 2025). IAS 39 hadir untuk mengatur praktik tersebut, namun implementasinya dinilai kaku karena menuntut efektivitas lindung nilai. Akibatnya, banyak strategi hedging yang efektif secara ekonomi tidak dapat diakui secara akuntansi, sehingga laporan keuangan sering gagal merepresentasikan manajemen risiko yang sesungguhnya (Ali et al., 2025).

Peralihan ke IFRS 9 membawa pembaruan penting dengan pendekatan berbasis prinsip yang lebih adaptif. Penilaian tidak lagi bergantung pada uji efektivitas kuantitatif semata, melainkan pada hubungan ekonomi antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi. Dengan demikian, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan pencatatan akuntansi dengan praktik manajemen risiko yang dijalankan. Di Indonesia, adopsi IFRS 9 melalui PSAK 71 menjadi langkah strategis yang menegaskan *hedge accounting* bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian integral dari manajemen risiko korporasi (Arifullah & Firmansyah, 2021). Hal ini menunjukkan

bahwa evolusi *hedge accounting* tidak sekadar memperbaiki metode pencatatan, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara strategi akuntansi dan arah kebijakan bisnis.

Transformasi Standar *Hedge Accounting* dan Dampaknya

Perubahan standar dari IAS 39 ke IFRS 9, lalu ke PSAK 71, membawa konsekuensi signifikan terhadap praktik akuntansi dan perilaku pasar. IAS 39 dinilai terlalu normatif dan kurang selaras dengan kebutuhan ekonomi, sehingga perusahaan cenderung memilih strategi lindung nilai yang sesuai aturan meskipun tidak optimal secara manajerial. IFRS 9 kemudian memperbaiki kondisi ini dengan menyederhanakan mekanisme, memperluas instrumen yang memenuhi syarat, serta menekankan hubungan ekonomi dalam penetapan lindung nilai (Jiannan et al., 2024). Perubahan ini mendorong perusahaan untuk lebih proaktif menggunakan derivatif karena pengakuan akuntansinya kini lebih konsisten dengan praktik bisnis.

Dampak transformasi standar terlihat nyata di berbagai konteks. Penelitian global membuktikan bahwa penerapan IFRS 9 menurunkan volatilitas arus kas sekaligus meningkatkan kapasitas investasi (Ali et al., 2025; Kreß et al., 2025). Di Indonesia, penerapan PSAK 71 memicu kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sempat menekan laba bersih (Kustina & Putra, 2021). Namun, temuan selanjutnya menunjukkan bahwa langkah ini justru dinilai positif oleh investor karena mencerminkan kehati-hatian perusahaan dalam menghadapi risiko (Firmansyah et al., 2023). Dengan kata lain, transformasi standar *hedge accounting* berperan ganda: menjaga akurasi pelaporan sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya tahan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Implementasi *Hedge Accounting* untuk Stabilitas Keuangan

Penerapan *hedge accounting* dalam praktik nyata menegaskan perannya sebagai mekanisme penting bagi stabilitas keuangan perusahaan. Studi pada PT Pelindo I menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 meningkatkan CKPN hingga 219,60%, yang meskipun menekan laba jangka pendek, dipandang sebagai strategi mitigasi risiko yang lebih akurat (Yunita & Indahwati, 2022). Kasus serupa terjadi pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., di mana peningkatan cadangan kerugian mengurangi profitabilitas,

tetapi secara bersamaan memberi sinyal positif bagi investor tentang keseriusan perusahaan dalam mengelola risiko (Khasify et al., 2023).

Lebih luas, penerapan *hedge accounting* terbukti memperkuat transparansi laporan keuangan, mengurangi asimetri informasi, dan menjaga stabilitas arus kas (Ali et al., 2025). Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi maupun bertahan dalam menghadapi gejolak global. Namun, tantangan implementasi masih cukup besar di Indonesia, terutama terkait kualitas sumber daya manusia, pemahaman standar, dan kesiapan infrastruktur akuntansi (Sukistini & Kristanti, 2024). Oleh karena itu, *hedge accounting* tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga instrumen strategis yang mencerminkan tata kelola perusahaan serta komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini memperlihatkan bahwa *hedge accounting* telah mengalami perubahan mendasar dari IAS 39 yang rigid menuju IFRS 9 yang berbasis prinsip, dan selanjutnya diadopsi ke dalam PSAK 71 di Indonesia. Transformasi tersebut bukan sekadar revisi teknis, melainkan pergeseran paradigma yang membuat laporan keuangan lebih merefleksikan strategi manajemen risiko yang dijalankan perusahaan. Bukti empiris, terutama dari sektor perbankan dan pembiayaan, menunjukkan bahwa *hedge accounting* mampu menekan volatilitas laba, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kredibilitas tata kelola meskipun dalam jangka pendek dapat mengurangi profitabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *hedge accounting* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan perusahaan dalam hal sumber daya manusia, teknologi akuntansi, dan kualitas pengungkapan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas ke sektor non-keuangan serta menelaah peran tata kelola perusahaan, regulasi domestik, dan dinamika pasar dalam mendukung efektivitas PSAK 71 sehingga *hedge accounting* dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap daya saing korporasi sekaligus stabilitas sistem keuangan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing yang telah membimbing kami proses penyusunan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi sumber referensi selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, W., Bens, D. A., & Cassar, G. (2025). Real Effects of Hedge Accounting Standards: Evidence from ASU 2017-12. *Journal of Accounting Research*, March. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12614>
- Allini, A., Maffei, M., Santonastaso, R., & Spagnuolo, F. (2025). Hedge accounting usage and capital investment: European evidence under IFRS requirements. In *Journal of Management and Governance* (Vol. 29). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10997-024-09715-x>
- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). PENCADANGAN PIUTANG PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PENERAPAN PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142.
- Dialysa, F. (2024). Analisis Strategi Hedging untuk Manajemen Risiko Optimal pada Perbankan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(4), 68–72. <https://doi.org/10.55606/mri.v2i4.3169>
- Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Value relevance of IFRS 9 adoption: A case study of Indonesian banking companies. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 503–518. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17574>
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA. *AKUNTANSIKU*, 2(2), 67–73.
- Jiannan, Y., Hassan, M. S., Abdullah, M. B., & Nor, H. B. M. (2024). The effects of IFRS 9: A systematic literature review. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 16(4), 2064–2079.
- Khasify, A. A. A., Natalina, A., & Purwaningrum, S. (2023). Dampak Implementasi Psak 71 Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 28–36.
- Kreß, A., Eierle, B., C, S. H., & Mazz, F. (2025). Hedge accounting and firms' future investment spending. *Finance Research Letters Journal*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106477>
- Kustina, K. T., & Putra, I. G. P. N. A. (2021). IMPLEMENTASI PSAK 71 JANUARI 2020 DAN PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Maurida, Z. (2022). ANALISIS PENERAPAN EXPECTED CREDIT LOSS (ECL) TERHADAP PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI MENURUT PSAK NO. 71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)*, 27(2), 120–131. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.373>

- Ogundu, P. G. (2025). The strategic implications of financial derivatives in hedging corporate exposure to global economic volatility. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(2). <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0482>
- Rahayu, D. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 71 TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (Studi Kasus pada PT Bank XYZ Tbk). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13–25.
- Razak, L. A., Haliah, Habbe, A. H., & Usman, A. (2023). Respon Investor atas Kebijakan Instrumen Hedging di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.35326/jiam.v6i1.3308>
- Sukistini, A. S., & Kristanti, C. (2024). DAMPAK STRATEGI HEDGING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 3(1), 92–105.
- Tantry, V. I., & Lindrawati. (2023). Determinan Keputusan Lindung Nilai pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5621>
- Yunita, D. I., & Indahwati, R. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71 terhadap Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Cadangan Penurunan Nilai Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 1–12.